SUARA

PEMBARUAN AGRARIA

Menguak Geliat Reforma Agraria di Jawa Bagian Selatan





Edisi 1/2010

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

HIGHLIGHT : Satu Lagi, Petani Ciamis Menjadi Korban

cari... Cari

HOME | BERITA TERKINI | ORGANISASI | KAMPANYE | KPA WILAYAH | DOWNLOAD | GALERI MEDIA



Artikel Terkini | Resolusi | Sikap | Media | Arsip

Tidak Ada Komitmen Politik Melaksanakan Pembaruan Agraria
By: Idham Arsyad Jakarta - Sebagai negara agraris, Indonesia tidak bisa mel...

Mencegah Eksploitasi Buruh Migran
by : Idham Arsyad TRAGEDI penganiayaan buruh migran perempuan di luar n...



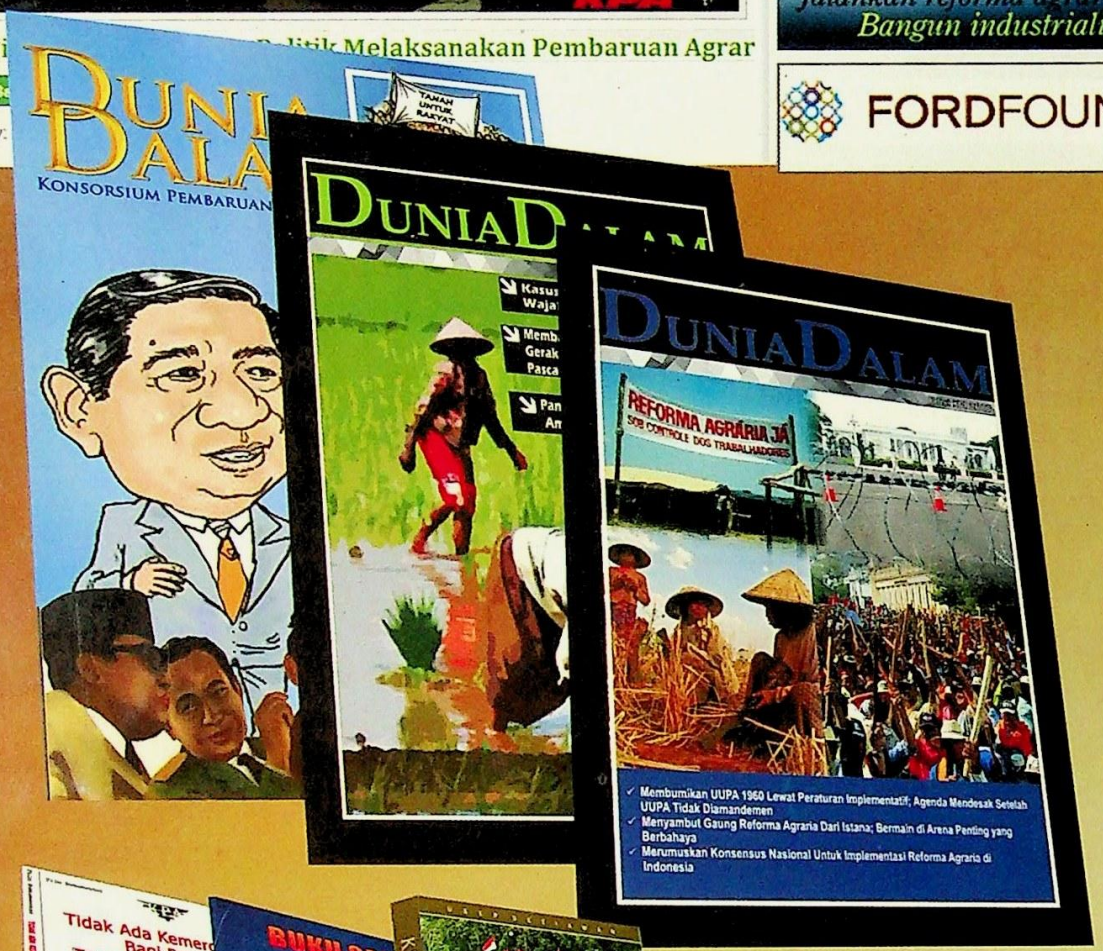
Kapolri Baru & Konfik Agraria
By: Idham Arsyad Akhirnya Komisaris Jenderal Timur Pradopo sah menjadi Kapo...

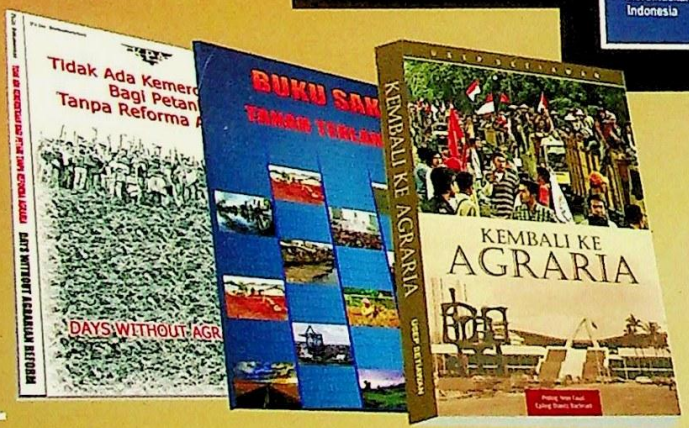


Jika PP Reforma Agraria Terbit: Renungan Hari Agraria

Jalankan reforma agraria sejati & Bangun industrialisasi nasional

FORDFOUNDATION





Terbitan KPA

Catatan Redaksi

Tak dapat dipungkiri. Tingginya angka kemiskinan di Jawa Bagian Selatan, salah satu sumber penyebabnya ialah tidak dilaksanakannya reforma agraria. Menyadari hal ini, pemerintah SBY mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Sebagai pilot project-nya, pemerintah akan mengawalinya dari Jawa Bagian Selatan.

Namun, dalam praktiknya, PPAN yang diumumkan pemerintah sebagai sebuah bentuk dari pelaksanaan reforma agraria, ternyata hanya sekadar sertifikasi tanah masyarakat. Bukan sebuah pelaksanaan reforma agraria sebagaimana amanat dalam UUPA No.5 Tahun 1960.

Fakta ini, tentu saja mendapat kritikan ari berbagai kalangan aktivis dan organisasi ani. Selain dianggap tidak akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, program sertifikasi tanah hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Karena, program sertifikasi tanah ini sebenarnya bukan untuk melindungi petani atau rakyat. Melainkan sekadar untuk membuka pasar dan liberalisasi tanah sesuai kepentingan kapitalis.

Meski begitu, KPA berpandangan PPAN tetap harus dikawal dan dikontrol. Tujuannya, untuk menguatkan basis massa perlawanan petani. Suara Pembaruan Agraria edisi kali ini, mencoba mengupas persoalan tersebut sebagai sebuah laporan utama. Terutama yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan reforma agraria di Jawa Bagian Selatan.

Sebagaimana kita pahami, reforma agraria sejati tentu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa peran aktif dari organisasi-organisasi tani. Dalam edisi ini, Suara Pembaruan Agraria juga mencoba mengulas tentang Pentingnya Konfederasi Nasional Serikat Tani di halaman 14.

Pembangunan opini publik tentu sangat penting. Rublik Suara Agraria di halaman 17 akan mengulas tentang masalah reforma agraria yang mengudara secara rutin di radio RRI. Semoga kehadiran buletin Suara Pembaruan Agraria ini bermanfaat bagi pembaca. Wasalam.

Redaksi

Suara Pembaruan Agraria
Edisi: I/2010

Penanggung Jawab: Idham Arsyad. **Pemimpin Redaksi:** Iwan Nurdin **Dewan Redaksi:** Iwan Nurdin, Usep Setiawan, DD. Shineba, T. Kinan, Yusriansyah, Agus Nurdin, Zaenal, Untung Saputra, Dewi Kartika, Diana, Sidik Suhada, Adhi Wibowo **Fotografer:** Kent Yusriansyah, **Layout :** Adinesia **Alamat Redaksi:** Jalan Duren Tiga No. 64, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 **Telp:** 021-79191703 Fax: 021-79190264 **Email:** kpa@kpa.or.id.

Buletin Suara Pembaruan Agraria diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima tulisan, baik berupa liputan atau opini. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Tulisan dapat dikirim melalui email: kpa@kpa.or.id atau sidik_dipantara@yahoo.com.

FORDFOUNDATION

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Meretas Jalan Reforma Agraria di Jawa Bagian Selatan

Pemerintah kembali menjanjikan akan segera meredistribusikan tanah untuk rakyat miskin sebagai bentuk pelaksanaan reforma agraria. Salah satu ujicobanya program ini akan dilaksanakan di Jawa Bagian Selatan. Bagaimana bentuknya? Berikut laporan tim liputan Suara Pembaruan Agraria (Iwan Nurdin, Sidik Suhada, dan Kent Yusriansyah)

Masyarakat petani di Jawa Bagian Selatan, boleh tersenyum, sebab BPN akan melakukan ujicoba pelaksanaan pembaruan agraria di wilayah ini, demikian janji BPN.

Dalam pemaparannya di depan organisasi tani di tiga wilayah Jawa, Kepala BPN Joyo Winoto menjelaskan bahwa ujicoba program ini dikarenakan problem yang melingkupi wilayah Jawa Bagian Selatan. *Pertama*, dalam hal pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan jauh tertinggal di banding wilayah pantai utara (Pantura) Jawa. *Kedua*, konsentrasi kemiskinan di pulau Jawa berada di wilayah selatan. *Ketiga*, wilayahnya rawan mengalami bencana alam. Terakhir, wilayah ini banyak ditemukan objek dan subjek pembaruan agraria.



Demo Petani: Serikat Petani Pasundan (SPP) berunjuk rasa menuntut reforma agraria, di Jakarta.

Ujicoba program ini, rencananya akan dilakukan di beberapa kabupaten di Jawa Bagian Selatan. Diantaranya, Kabupaten Lebak dan Pandeglang (Banten), Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, dan Sragen (Jawa Tengah). Di Jawa Timur, program ini rencananya akan dilakukan di Kabupaten Bayuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, dan Kediri.

Rencana ini disambut hangat oleh organisasi petani di Jawa. Sebab, konsentrasi konflik agraria yang biasanya dialami organisasi petani juga berada di Jawa Bagian Selatan. Sebutlah contoh Serikat Petani Pasundan (SPP) yang sebagian besar anggotanya berada di Jawa Barat bagian selatan seperti Ciamis, Garut dan Tasikmalaya.

Namun, dalam perjalanannya redistribusi tanah untuk petani yang dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan reforma agaria oleh pemerintah, implementasinya ternyata hanya berupa sertifikasi tanah individual dan bagi-bagi sertifikat tanah.

Program bagi-bagi sertifikat tanah yang

dimaknai sebagai pelaksanaan landreform oleh pemerintah itu, tentu saja banyak mendapat keritik pedas dari para penggiat gerakan reforma agraria.

"Praktik ujicoba landreform yang dijalankan BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu seperti usaha mengatasi wabah malaria dengan cara membagi-bagi kelambu pada rakyat. Tentu tidak akan dapat mencapai tujuan," kata Dewan Pakar KPA, Noer Fauzi pada acara seminar di BPN.

Jika mengacu pada UUPA No. 5/1960 dan peraturan pelaksananya, reforma agraria tidak terkait samasakali dengan bagi-bagi sertifikat tanah untuk kaum tani.

Reforma agraria adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kaum tani. Menciptakan kedaulatan pangan dan membangun pondasi perekonomian negara yang mandiri, kuat, serta kokoh.

Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria bertujuan untuk menghapuskan praktik-praktik penindasan yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Penindasan tersebut, salah satunya terjadi karena penguasaan tanah sebagai sumber kehidupan pokok masyarakat Indonesia tidak merata.

Data dari BPN RI menunjukan, saat ini hanya ada 0,2% orang yang menguasai sekitar 56% tanah di seluruh Indonesia. Data ini tentu mencengangkan. Karena, ada praktik monopoli penguasaan tanah di negara yang memiliki asas keadilan sosial sebagaimana sila kelima pancasila.

Selain itu, kritik terhadap ujicoba ini dikarenakan sertifikasi di Jawa Bagian Selatan ini ternyata diikuti dengan pembangunan infrastruktur Jalan Trans Nasional Selatan Jawa. Sebenarnya, "reforma agraria" versi BPN salahsatu upaya memuluskan pembangunan infrastruktur yang kerap kali menghadapi kesulitan soal tanah. Mengapa kebanyakan berubah menjadi sertifikasi karena untuk memuluskan ganti kerugian tanah.

Dalam sebuah seminar di Jakarta, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Doddy Imron Cholid, mengatakan, ada sekitar 132,68 kilometer tanah yang belum dibebaskan untuk proyek pembangunan jalan lintas selatan sepanjang 213,08 kilometer di provinsi Jawa Tengah. "Kendalanya keterbatasan dana dan belum ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dan pengembang," kata Doddy Imron Cholid dalam forum seminar nasional bertema



Musim Tanam: Seorang petani di Kab. Cilacap, Jawa Tengah sedang menyiapkan bibit padi untuk ditanam.


Sekjend KPA, Idham Arsyad

"Menuju Pembaruan Agraria Pro-Rakyat Miskin: Urgensi dan Pelaksanaannya di Indonesia", yang diselenggarakan KPA, di Jakarta, (3/2/2010).

"Sertifikat tanah yang akan dilakukan pemerintah saat ini, sebenarnya itu program yang selama ini dikampayekan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) kepada negara-negara yang sedang berkembang. Tujuannya untuk menjalankan pasar tanah liberal," tegas Sekjen KPA, Idham Arsyad, saat dihubungi tim liputan media ini.

Karena itu, lanjut Idham Arsyad, rencana redistribusi tanah di Jawa Bagian Selatan itu sebenarnya bukan sebuah bentuk pelaksanaan reforma agraria seperti amanat UUPA No.5 Tahun 1960. Melainkan sebuah upaya dari pemerintah yang sebenarnya anti reforma agraria.

Kritik dan Harapan

Selain menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, sejumlah harapan dari kalangan serikat tani juga terlontar. Bagi organisasi tani di wilayah Jawa Bagian Selatan, program ujicoba pembaruan agraria ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang telah lama dialami oleh mereka.

Karena itu, KPA memandang bahwa ujicoba ini harus dikawal. Pengawalan yang dilakukan oleh KPA dilakukan dengan prinsip "kolaborasi kritis" yakni mengawal dan melakukan pengkritisan di dalamnya.

"Agar wacana dan api semangat reforma agraria bisa terus dihidupkan tidak saja di kalangan gerakan tapi di kalangan birokrasi pemerintah" papar Idham Arsyad, Sekjen KPA.

Pengawalan kritis ini juga diletakkan dalam kerangka mendorong pembaruan agraria yang menyeluruh dan mencegah pasar tanah liberal," tegas Idham Arsyad.

Sertifikasi yang diikuti komoditasi dan pasar tanah secara liberal, jelas hanya akan mengukuhkan ketimpangan serta melanggengkan ketidakadilan. Bukan untuk mengentaskan kemiskinan petani seperti yang selama ini dikampayekan pemerintah.

"Inilah yang harus tetap dikritisi. Jangan sampai redistribusi tanah itu dijadikan sebagai jalan pintas untuk melicinkan proses jual beli tanah," terangnya.

Sedikitnya ada tiga hal yang harus diingatkan terkait rencana redistribusi tanah yang akan dilakukan pemerintah. *Pertama*, definisi redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah jelas tidak sebangun dengan konsep reforma agraria secara *genuine* sebagaimana UUPA. *Kedua*, tanah yang dijadikan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah yang dikuasai secara monopolistik oleh sebuah perusahaan-perusahaan swasta. Jika tanah-tanah itu dirasa masih kurang, tanah negara pun dapat digunakan untuk menambah kekurangan itu. *Ketiga*, pihak penerimanya adalah rakyat kecil yang miskin dan berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Bukan yang lain.

Namun, untuk mewujudkan semua itu tentu tidak mudah. Apalagi jika tidak ada dorongan yang kuat dari berbagai kalangan. Terutama dari para aktivis tani dan organisasi-organisasi tani. Karena itu, dalam kerangka mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut, KPA terus berusaha mengkonsolidasikan organisasi-organisasi yang ada.

Tidak ada jalan lain untuk meretas reforma agraria di Jawa Bagian Selatan, kecuali menyediakan partisipasi aktif dari organisasi tani yang solid. Hanya dengan kekuatan organisasi tani yang terpimpin dan bersifat masif, reforma agraria sejati dapat diujudkan untuk kemakmuran bersama. Semoga*

Tingginya Angka Kemiskinan di Desa "Butuh Praktik Pembaruan Agraria Pro Rakyat Miskin"

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, saat ini sedikitnya ada 14,3 % orang miskin dan kebanyakan berprofesi sebagai petani. Lebih dari 6,1 juta jiwa adalah petani yang tidak punya lahan.

Di Jawa, sedikitnya ada 12,5 juta Rumah Tangga Tani (RMT) atau sekitar 50 juta jiwa petani. Sekitar 49% dari jumlah petani yang ada di Jawa, ternyata tidak memiliki lahan dan tanah sendiri. Sedangkan mereka yang memiliki, rata-rata hanya memiliki lahan tidak lebih dari 0,36 hektar. Sehingga mereka hanya sekadar menjadi petani gurem. Sisanya buruh tani.



Protes: Anak-anak jalanan di Malang membentangkan poster sebagai bentuk protes pada pemrintah atas penderitaan yang mereka alami. (Repro kompas.com)

Setiap tahun, jumlah petani gurem yang beralih status menjadi buruh tani pun terus bertambah. Berdasarkan catatan data BPS, jumlah petani miskin yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar pada tahun 1993 mencapai 10 juta lebih. Setahun kemudian meningkat menjadi 13 juta lebih.

Salah satu penyebab yang mempercepat pertumbuhan jumlah petani gurem beralih status menjadi buruh tani adalah konversi lahan. Banyak lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

Sekretaris Pusat Pengembangan Hukum Agraria Universitas Brawijaya Malang, Imam Koeswahyono, SH, M.Hum mengatakan, pada tahun 1993, lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan non pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun. Tahun 2003 atau sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 178 ribu hektar per tahun. Tahun 2009 ini meningkat lagi menjadi 200 hektar per tahun.

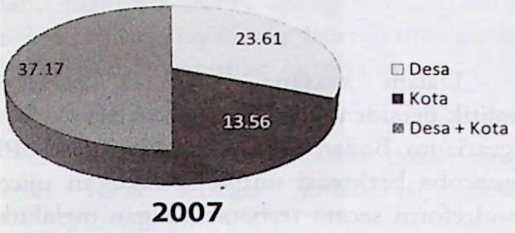
"Fenomena inilah yang dinamakan fenomena lapar tanah. Siapa yang lapar tanah? Mereka adalah kelompok-kelompok kapitalis," ungkapnya.

Peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian ini, kata Imam Koeswahyono, ada yang berubah jadi perumahan, kawasan industri, pusat-pusat perdagangan, dan sebagainya. Akibatnya, banyak petani yang menjadi tidak punya lahan pertanian sendiri. Sehingga angka kemiskinan pun menjadi semakin bertambah.

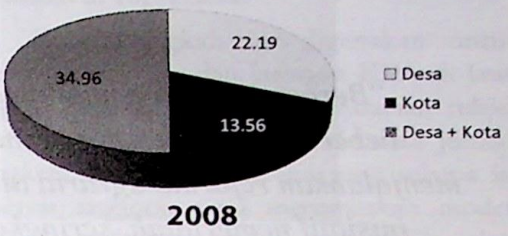
Tingginya angka kemiskinan yang diakibatkan tidak adanya kepemilikan lahan, tentu cukup mengkawatirkan semua orang. Terutama bagi kalangan aktivis gerakan reforma agraraia.

Jumlah Kemiskinan di Indonesia

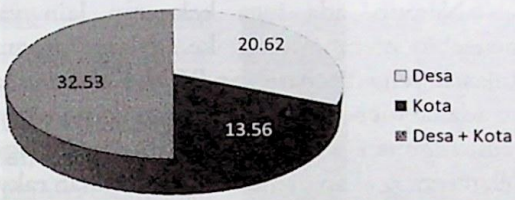
(Juta Jiwa)



2007



2008



2009

Sumber: BPS, diolah oleh Deputi Riset dan Kampanye KPA

"Sudah saatnya pemerintah menjadikan pembaruan agraria, sebagai agenda utama untuk mengentaskan kemiskinan," kata Sekjen KPA, Idham Arsyad.

Akar persoalan dari kemiskinan ini, lanjut Idham Arsyad, sebenarnya persoalan kepemilikan tanah. Ada sebuah ketimpangan kepemilikan tanah yang selama ini tidak dapat diatasi oleh pemerintah. Hanya sedikit orang yang menguasai tanah di Indonesia. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, sekitar 56% tanah yang ada di seluruh Indonesia, ternyata hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 orang saja.

Pembaruan agraria atau reforma agraria, kata Idham Arsyad, sebenarnya bukan hanya sekadar untuk menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan tanah. Namun, tujuan utama dari pelaksanaan reforma agraria adalah menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, reforma agraria juga bertujuan untuk membangun pondasi perekonomian negara yang kokoh dan tidak mudah digoyang oleh sistem ekonomi yang diterapkan negara lain. Membangun ketahanan pangan nasional pro rakyat dan berbasis massa petani.

Menurut Idham Arsyad, rakyat Indonesia butuh model dan praktek pembaruan agraria pro rakyat miskin yang memiliki landasan: Mementingkan peranan organisasi rakyat, mendorong peran aktif pemerintah atas keadilan sosial, memulihkan krisis yang terjadi, dan menjadikannya pilar utama untuk menata kembali struktur industri nasional yang adil untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, imbuh Idham Arsyad, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain melaksanakan reforma agraria jika ingin serius mengentaskan kemiskinan. Begitu juga ketika pemerintah berencana melaksanakan program pembaruan agraria nasional di Jawa Bagian Selatan. "Semata-mata harus di dasarkan atas kepentingan rakyat. Bukan sekadar untuk mencari popularitas dan politik pencitraan diri," tegasnya* (Sidik Suhada, Kent Yusriansah)

Mengawal Pelaksanaan Reforma Agraria Jawa Selatan

"Bercermin dari pengalaman beberapa negara yang pernah menjalankan reforma agraria atas inisiatif pemerintah, seringkali hasilnya tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Karenanya, reforma agraria di Jawa Bagian Selatan yang dijalankan pemerintah perlu dikawal agar tujuan dan hasilnya sesuai keinginan rakyat. Khususnya kaum tani," kata Sekjend KPA, Idham Arsyad.

Oleh: SIDIK SUHADA
ADANG SATRIYO

Banyak pihak bertanya-tanya terhadap langkah pengawalan yang dilakukan oleh KPA terkait dengan Rajasela. Pernyataan tersebut di atas, diungkapkan untuk memberikan jawaban.

Menurut Idham Arsyad, sebenarnya pengawalan ujicoba Rajasela sesungguhnya berada dalam kerangka pengawalan terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). KPA memandang, PPAN hanya sekadar salah satu peluang yang tersedia. Namun, bukan sarana sarana untuk menciptakan pembaruan agraria sejati sebagaimana yang diinginkan rakyat selama ini.

Tidak adanya komitmen politik yang kuat dari presiden terhadap masalah pelaksanaan reforma agraria salah satu sebabnya. Buktinya, sampai sekarang presiden pun belum membuat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan PPAN.

Dalam suasana lemahnya komitmen politik presiden terhadap pelaksanaan reforma agraria itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencoba berkreasi untuk melakukan ujicoba landreform secara terbatas dengan melakukan program reforma agraria sejati di Jawa Bagian Selatan (Rajasela).

Namun, ada juga kekuatan lain yang mencoba membonceng ke dalam program Rajasela yang dicanangkan BPN. Kekuatan lain itu adalah mereka yang menginginkan program pembangunan infrastruktur di Jawa Bagian Selatan yang akan memakai tanah-tanah rakyat, dapat berjalan mulus.

Ada aroma. BPN pun patut diduga kuat terlibat dalam kekuatan yang membonceng Rajasela untuk memuluskan program pembangunan infrastruktur di Jawa Bagian Selatan. Buktinya, secara gencar BPN pun terus berusaha mempercepat sertifikasi tanah masyarakat di wilayah itu. Harapannya, tentu saja untuk memudahkan proses ganti rugi tanah-tanah masyarakat yang akan digunakan sebagai objek pembangunan infrastruktur tersebut.

Lantas, mengapa KPA tetap melibatkan diri untuk melakukan pengawalan terhadap program Rajasela?

Dari sisi KPA, tak ada kepentingan lain, selain ingin mendorong agar reforma agraria sejati dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat. Secara taktis, PPAN dapat dijadikan sarana untuk memajukan agenda pembaruan agraria sejati yang selama ini dicita-citakan rakyat. Rajasela dipandang sebagai sebuah peluang dalam rangka untuk memperjuangkan anggota-anggota KPA dan jaringannya, yang selama ini terlibat dalam konflik agraria di

wilayah Jawa Bagian Selatan.

"Berpijak dari pemahaman dan posisi itulah, mengapa KPA mengawal Rajasela," pungkas Idham Arsyad saat ditemui tim liputan buletin Suara Pembaruan Agraria.

Kolaborasi Kritis

Sikap pengawalan Rajasela inilah yang disebut KPA sebagai "kolaborasi kritis". Mengapa demikian?

Secara taktis, KPA memang mengajak BPN bekerjasama untuk menjalankan program itu. Namun, secara kritis, KPA tetap selalu memberikan catatan-catatan dan pandangan kritis di dalam pelaksanaan Rajasela.



Diskusi Publik: Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin bersma BPN merancang pelaksanaan pembaruan agraria di Jawa selatan

Menurut Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan, langkah "kolaborasi kritis" Rajasela diambil KPA sejak 2008. Bentuk kongkretnya adalah: *Pertama*, KPA mencoba mengajak Kepala BPN dan jajarannya untuk bertemu dengan aktivis, pegiat pembaruan agraria, serta serikat petani di wilayah Jawa Bagian Selatan.

Tujuannya dari pertemuan ini adalah agar mereka dapat duduk bersama, saling memberi masukan, harapan, kritik, dan sekaligus menyampaikan kekhawatirannya terkait program Rajasela. Pertemuan tersebut tercatat dilakukan oleh BPN sebanyak tiga kali yakni di Bandung, Wonogiri, dan Blitar.

Kedua, langkah ini dilakukan KPA dalam kerangka untuk melakukan pelatihan bersama antara BPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), KPA, dan Sains Institute dalam melakukan analisa database agraria yang diadakan di Yogyakarta.

Ketiga, langkah ini digunakan untuk mengajak anggota dan jaringan KPA di Jawa Bagian Selatan, melakukan pendataan subjek dan objek reforma agraria. Mendata jumlah sengketa dan konflik agraria yang selama ini dialami anggota, serta merumuskan model-model pembaruan agraria yang diinginkan anggota dan masyarakat untuk disandingkan dengan database yang digarap BPN.

Dalam periode pergantian kepemimpinan Sekjen KPA dari Usep Setiawan ke Idham Arsyad, pandangan ini tetap diteruskan. Agar lebih fokus dalam pengawasan, sebagai ujicoba, KPA hanya mengambil delapan kabupaten dari 34 kabupaten yang dipilih oleh BPN untuk pelaksanaan program Rajasela.

Delapan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lebak (Banten), Bandung, Garut, Ciamis (Jabar), Gunung Kidul (DIY), Cilacap (Jateng), Blitar, dan Malang (Jatim).

Harapannya dengan aktif di delapan kabupaten ini, KPA dapat berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa agraria yang dialami oleh petani, sekaligus dapat mendorong pembangunan model-model pelaksanaan pembaruan agraria yang memihak rakyat miskin.

"Ini sangat penting dalam usaha

membangun keragaman model sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing," tegasnya.

Membangun Model

Jawa Bagian Selatan memang mempunyai karakter khusus. Selain wilayah ini padat penduduk, sebagian besar masyarakatnya hanya petani miskin dan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan Jawa Bagian Utara.

"Selama ini pemerintah hanya berpikir memindahkan mereka ke luar Jawa melalui transmigrasi. Tentu ini bukan satu-satunya solusi," demikian ungkap Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin.

Namun, lanjut Iwan Nurdin, paling kerap dilakukan pemerintah adalah membiarkan mereka ikut arus dan tersangkut dalam kampung-kampung kumuh di perkotaan. Karena, tidak semua dapat terserap dalam lapangan kerja.

Berdasarkan hasil pantaun KPA, kata Iwan Nurdin, persoalan terbesar di desa-desa di Jawa adalah kelangkaan tanah pertanian untuk rakyat dan kelebihan jumlah tenaga kerja. Selain itu, tidak berkembangnya teknologi pertanian yang dapat diakses petani miskin juga menjadi persoalan tersendiri.

Hal itulah yang harus dijawab melalui pembaruan agraria di Jawa. "Merumuskan dan menemukan model ekonomi pembaruan agraria yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Bagian Selatan, tentu menjadi sangat penting dan menantang," ungkap aktivis tani itu.

Lebih lanjut, Iwan Nurdin mengatakan, "Salah satu model yang didorong oleh KPA adalah kombinasi penyelesaian sengketa dengan pengentasan kemiskinan."

Lantas ia mencontohkan kehidupan petani yang ada di area sengketa agraria. Selama ini, kata Iwan Nurdin, banyak tanah-tanah sengketa yang sebenarnya sudah lama dikuasai oleh para petani. Namun, faktanya tanah-tanah yang sudah dikuasai petani itu ternyata belum dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Padahal, semua orang mengakui ada kesadaran politik dan pemahaman hukum di kalangan petani yang menguasai tanah tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan petani lainnya.

Karena itu, Deputi Riset dan Kampanye KPA itu berharap agar penyelesaian sengketa agraria jangan hanya dimaknai sebagai penguatan hak semata. Jika hanya itu, maka dapat dipastikan bahwa perubahan ekonomi masyarakat tidak akan banyak terjadi. Apalagi, persis tanah yang disertifikatkan secara individual itu sesungguhnya sangat kecil. Jadi rawan dijual kembali oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Karena itu, dalam program Rajasela, KPA berusaha mengawal untuk mendorong adanya sertifikat kolektif. Namun, ia mengakui ada kelemahan memang dari sudut pandang regulasi. Sebab, belum ada aturan di dalam UUPA yang dapat mewadahi tentang sertifikat kolektif itu. Bagaimana cara menyiasatinya?

"Salah satu model yang digagas KPA adalah pembentukan koperasi-koperasi petani yang mengusahakan model pertanian terpadu di atas tanah-tanah mereka. Singkatnya, pengusahaan kolektif di atas tanah individu itu diwadahi oleh koperasi," jelas Iwan Nurdin.

Melalui pola ini, lanjutnya, tanah-tanah kepemilikan individu yang dipunyai petani dan disertifikatkan oleh BPN, itu harus dikonsolidasikan kembali oleh koperasi petani dalam satu pengusahaan pertanian.

"Jika ada kelebihan tenaga kerja di atas tanah itu, kombinasikan dengan peternakan, pembuatan pupuk, dan pestisida organik harus dilakukan. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja yang jadi pengangguran. Semua dapat diserap,"

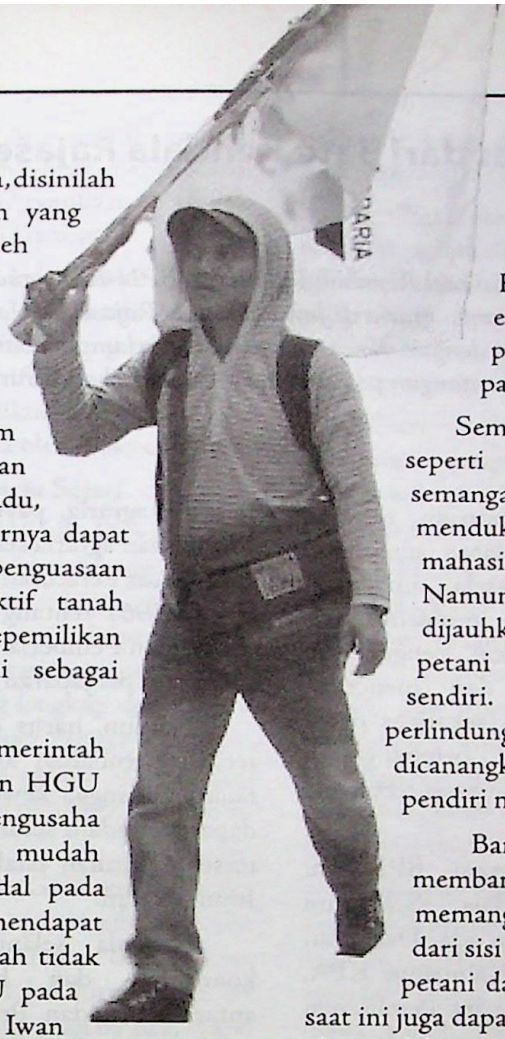
tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, disinilah pentingnya akses reform yang kerap disebut-sebut oleh pemerintah. Tanpa akses reform, semua model itu bisa menjadi sia-sia.

Idealnya HGU

Selain sistem koperasi dan pengusahaan model pertanian terpadu, sistem ideal yang sebenarnya dapat dijalankan adalah penguasaan dan pengusahaan kolektif tanah pertanian melalui kepemilikan HGU. Koperasi petani sebagai langkah utamanya.

"Selama ini pemerintah mudah mengeluarkan ijin HGU untuk konglomerat dan pengusaha besar. Pemerintah juga mudah memberikan kredit modal pada pengusaha yang sudah mendapat HGU. Kenapa pemerintah tidak mau memberikan HGU pada rakyat dan petani?" kata Iwan Nurdin.



Sebenarnya, lanjut Iwan Nurdin, kalau kita baca kembali semangat UUPA No.5 Tahun 1960. Salah satu cita-cita dari pendiri republik ini, sebenarnya para petani itulah yang harus didorong agar mempunyai badan usaha pertanian dalam wadah koperasi, manajemennya modern, dan memakai teknologi maju.

"Koperasi-koperasi petani itulah yang akan mengelola HGU," tandasnya.

Namun, lanjut Iwan Nurdin, "Semangat para pendiri republik ini, nampaknya sudah hilang dan tidak ada lagi dalam jiwa para penentu kebijakan yang ada saat ini. Sehingga HGU sekarang hanya untuk perusahaan besar dan petani hanya disuruh menjadi buruh di perkebunan besar."

"Sehingga, saat ini HGU tak ada bedanya dengan erpacht ala Agrarisce Wet 1870 pemerintah Hindia Belanda," paparnya.

Sementara, bank milik pemerintah seperti BRI, kata Iwan Nurdin, semangat awalnya sebenarnya untuk mendukung petani dan mahasiswa-mahasiswa di fakultas pertanian. Namun, sekarang justru semakin dijauhkan dari petani. Akibatnya, petani sekarang seperti berjuang sendiri. Tanpa pengawalan dan perlindungan dari negara seperti yang dicanangkan dan dicita-citakan para pendiri negeri ini.

Banyaknya hambatan dalam membangun model semacam ini, memang tidak semata-mata datang dari sisi pemerintah. Namun, pada sisi petani dan organisasi rakyat yang ada saat ini juga dapat menjadi penyebab kegagalan jika model ini diterapkan. Pasalnya, pertanian kolektif dalam manajemen bersama seperti itu, masih jauh dari pengalaman mereka sehari-hari. Sekalipun, mereka hidup dalam diskusi dan catatan aktivis tapi tidak ada dalam praktik langsung dalam kehidupan petani.

Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan bukan hanya sekadar mendorong kelahirannya badan-badan usaha pertanian kolektif tersebut. Namun, pararel dengan hal itu wajib dibentuk pemahaman bersama dikalangan organisasi petani. Tentang pentingnya organisasi ekonomi petani sebagai kerangka pembaruan agraria sejati ■

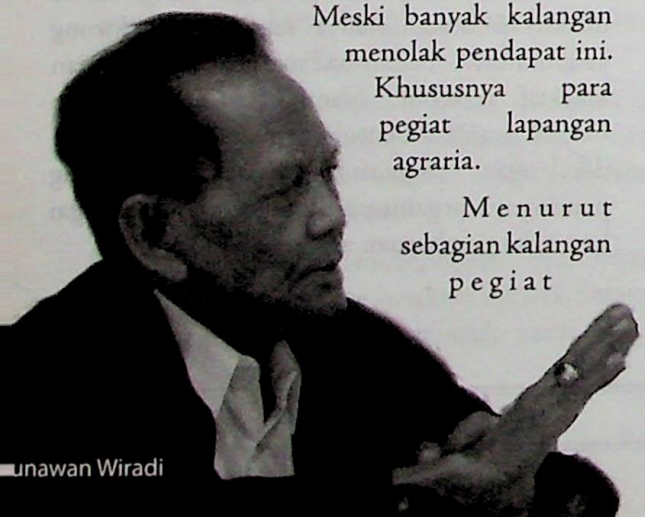
Belajar dari Batu Kendala Rajasela

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) mencanangkan uji coba pelaksanaan reforma agraria di Jawa Selatan (Rajasela). Namun, banyak pihak merasa pesimis dengan rencana tersebut. Terlampau banyak kendala menghadang, meski bentangan potensi keberhasilan bukan berarti tidak ada.

Ujicoba rencana pelaksanaan reforma agraria di Jawa Bagian Selatan atau lebih dikenal dengan istilah Rajasela, dihajatkan untuk menjawab beberapa problem khas di Jawa Bagian Selatan. Yakni, pengentasan kemiskinan, memperbaiki, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, sekaligus dasar ɔijakan untuk mempercepat pembangunan vilayah di Jawa Bagian Selatan yang tertinggal jauh dari wilayah Utara.

Namun, rencana program BPN itu bukan berati tanpa kendala. Sekalipun potensi keberhasilannya, tetap ada. Demikian ungkap Deputi Kajian dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin pada buletin Suara Pembaruan Agraria.

Menurut Iwan Nurdin, hal pertama yang menjadi batu kendala dalam program rajasela adalah soal regulasi. Sebab, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dicanangkan BPN-RI itu belum mempunyai payung hukum yang kuat. Meski banyak kalangan menolak pendapat ini. Khususnya para pegiat lapangan agraria.



unawan Wiradi

Menurut sebagian kalangan pegiat reforma agraria, payung hukum pelaksanaan pembaruan agraria sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagai salah satu penjabaran pelaksanaan landreform.

Namun, harus diingat, dewasa ini telah terjadi perubahan kelembagaan yang sangat tajam. Sehingga kewenangan BPN tidak lagi dapat terwadahi secara penuh dalam peraturan tersebut. "Itulah salah satu kendalanya," tegas Iwan Nurdin.

Kendala selanjutnya adalah masalah koordinasi dan hubungan kelembagaan antara BPN dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ujicoba ini. Sudah banyak diulas oleh banyak kalangan, sepanjang reformasi dan era otonomi daerah, titik temu programatik antara pusat dan daerah kerapkali sulit diwujudkan.

Selain itu, kata Iwan Nurdin, tidak adanya kesiapan aparat dan pegawai BPN dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjalankan program reforma agraria juga menjadi persoalan tersendiri.

Lemahnya dukungan dari organisasi masyarakat untuk menyokong program ini juga bisa menjadi penghambat. Padahal, sokongan dan keterlibatan dari organisasi masyarakat akan sangat menentukan, bagaimana reforma agraria sejati diterapkan.

"Organisasi masyarakat harus terlibat dan dilibatkan secara aktif untuk menentukan model-model pelaksanaan pembaruan agraria yang akan dilaksanakan di lapangan".

Sehingga tak heran, lanjut Iwan Nurdin, setelah setahun lebih pelaksanaan ujicoba program Rajasela, sampai sekarang masih saja berkutat pada program sertifikasi penguatan hak pada tanah yang sudah dikuasai langsung dan dikelola dalam waktu lama oleh masyarakat.

Menuju Pembaruan Agraria Sejati

Menurut Gunawan Wiradi, Dewan Pakar KPA, setiap pelaksanaan pembaruan agraria setidaknya membutuhkan lima prasyarat penting seperti: Komitmen pemerintah yang kuat dalam melaksanakan pembaruan agraria; Data agraria yang lengkap dan akurat; Organisasi rakyat yang kuat; Pengetahuan dan pemahaman akan reforma agraria yang meluas di tengah masyarakat; Terpisahnya elit politik dan elit bisnis.

Selain itu, tambah Gunawan Wiradi, pengalaman di beberapa negara terdapat syarat khusus lainnya yaitu: dukungan dari militer. Meski demikian, laki-laki kelahiran Solo, 84 tahun yang lalu itu mengingatkan bahwa, syarat tersebut sesungguhnya dapat ditanggulangi oleh sebuah komitmen politik yang kuat dari pemerintah dalam hal ini presiden.

Dalam menilai Rajasela, Dewan Pakar KPA ini mengungkapkan bahwa program Rajasela sama sekali ini bukanlah reforma agraria seperti yang selama ini telah digembar-gemborkan BPN melalui media massa. Sebab, penyertifikatan tanah dan menyelesaikan sengketa tanah yang dilaporkan kepada BPN adalah tugas pokok dan fungsi BPN. Sementara reforma agraria mempunyai tujuan untuk merombak struktur agraria.

Terlepas dari kekurangan dan kelemahan itu, Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan berpandangan bahwa, banyak pelajaran yang dapat dipetik dalam ujicoba Rajasela yang dicanangkan oleh BPN.

"Setidaknya ada dua pintu masuk utama yang bisa dijadikan pelajaran penting dari ujicoba Rajasela," kata Usep Setiawan. Pertama, program itu dapat dijadikan pintu masuk untuk penyelesaian sengketa. Kedua, tentu saja pintu untuk pengentasan kemiskinan.

"Dari kedua pintu itu, tentu ada pengalaman yang diperoleh dan dapat menjadi catatan kritis terkait keberhasilan dan kegagalan program itu," imbuhnya.

Dalam proses kerja, kata Usep Setiawan, BPN memulai dari dialog dengan organisasi petani, kemudian dialog bersama dengan kalangan akademisi di kampus, NGO, dan organisasi-organisasi tani untuk melengkapi data agraria di wilayah kerja Rajasela. Kemudian, baru menjalankan rencana program ujicoba Rajasela. "Track kerja ini tentu harus diapresiasi," tambahnya.

Sebagai aktivis reforma agraria, ia memberikan kritik tajam pada agenda BPN itu. Ia berharap, Rajasela tidak sebatas agenda " teknis administasi pertanahan" yang mana sudah menjadi tanggungjawab BPN. Harapannya, program ujicoba Rajasela yang telah dicanangkan BPN dapat lebih menonjol sebagai usaha untuk merombak struktur agraria yang timpang. Dengan demikian, diusahakan agar ujicoba Rajasela dapat menjadi jalan penting dan sekaligus batu loncatan untuk menuju tahapan lebih lanjut. Yakni, perjuangan pembaruan agraria sejati. Semoga! (Iwan Nurdin, Sidik Suhada)



Usep Setiawan

Pentingnya Konfederasi Nasional Serikat Tani di Indonesia

Oleh: Iwan Nurdin

Lahirnya gerakan sosial dan gerakan politik yang menuntut keadilan agraria melalui pembaruan agraria tidak dapat dipisahkan dengan berlakunya rezim politik agraria yang berlaku di tanah air sejak era kolonialisme hingga sekarang ini.

Pembedanya, pada masa lalu, gerakan-gerakan yang menuntut keadilan agraria tu sangat kental hubungan angsungnya dengan gerakan politik. Bahkan, gerakan langsung mengasosiasikan diri dalam wadah-wadah partai politik yang ada. Pembedaan lainnya, gerakan pada masa kolonialisme diarahkan langsung pada tuntutan politik tertinggi yakni, kemerdekaan nasional.


Iwan Nurdin.

Pada masa setelah kemerdekaan, khususnya di masa kekuasaan Soekarno, ciri-ciri ini tetap dipertahankan. Namun, di era kekuasaan Orde Baru, pola gerakan semacam ini yang menuntut pembaruan agraria, khususnya gerakan landreform dengan mudah diberi stigma PKI/ komunisme.

Gerakan pembaruan agraria mulai bangkit kembali secara perlahan pada masa Orde Baru di tengah kondisi masyarakat yang dididik oleh pemerintah untuk menjauhi aktifitas yang berbau politik dan ideologi (depolitisasi dan deideologisasi). Sehingga, salah satu ciri gerakan pembaruan agraria di masa orde baru (dan dalam beberapa hal bertahan hingga sekarang ini) adalah sebuah organisasi gerakan sosial dalam berbagai bentuk atau formasi organisasinya, meski sangat bertendensi politik dalam isu-isu perjuangan yang tengah dibangun.

Pada awalnya, wilayah-wilayah gerakan sosial Reforma Agraria ini tumbuh dan ditentukan oleh kreatifitas langsung dari para aktivis gerakan —biasanya kaum terpelajar dan atau kelas menengah perkotaan— serta pimpinan organisasi gerakan setempat untuk menumbuhkan sebuah solidaritas sosial yang baru.

Karena, depolitisasi inilah, para pelaku dan organisasi Reforma Agraria selalu menghindari pola-pola penyelesaian melalui politik yang artifisial dengan kekuasaan, semisal membuat organisasi politik. Sebab, di kalangan rakyat sendiri, pada masa itu menilai bahwa penyelesaian konflik agraria lewat jalur-jalur organisasi politik model begini dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan.

Para aktivis gerakan agraria, mendorong

tumbuhnya solidaritas dikalangan tani pada masa Orde Baru melalui sesuatu yang ada dan langsung dialami di dalam penderitaan kaum petani, semisal konflik agraria. Dari solidaritas bersama ini diharapkan tumbuh identitas gerakan pembaruan agraria dengan menjadikannya sebagai sebuah serikat atau organisasi petani.

Dari proses ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan terpenting dan sangat awal dari gerakan pembaruan agraria pada masa Orde Baru adalah kemampuan para aktivis gerakan memetamorfosakan ketidakpuasan masyarakat menjadi sebuah ikatan solidaritas.

Ikatan ini dibangun dari proses interaksi bersama-sama para aktivis dengan rakyat. Segala kreatifitasnya memanggil penderitaan yang tengah dialami oleh rakyat ke dalam sebuah "konfrontasi" terhadap politik agraria yang tengah berlaku. Sehingga lahirlah sebuah perasaan dan ikatan bersama.

Ciri lanjutan dari gerakan pembaruan agraria pada tahap ini adalah gerakan advokasi penyelesaian beragam kasus atau sengketa agraria. Karena itu, gerakan pembaruan agraria (GPA) adalah sebuah langkah kolektif dari sekumpulan orang-orang yang memiliki penderitaan yang sama dalam satu rezim penguasaan tanah yang mengeksploitasi mereka.

Gerakan ini tumbuh dan hidup dalam berbagai gerakan tani, masyarakat adat di tingkat lokal. Mereka, juga telah turut mendorong lahirnya gerakan tani di tingkat nasional sebagai sebagai sebuah bentuk representasi gerakan.

Selama ini, gerakan pembaruan agraria khususnya gerakan tani di tingkat nasional adalah terusan perjuangan yang kerapkali berfungsi sebagai pengeras suara dari berbagai rangkaian persoalan yang dialami oleh masyarakat agraria di tingkat lokal. Selain itu GPA di level nasional juga memainkan peran advokasi kebijakan yang bertujuan supaya kebijakan politik di tingkat nasional memberi ruang lebih besar dan luas bagi tumbuhnya gerakan-gerakan pembaruan agraria di lokal.

Namun, ciri terpenting dari gerakan pembaruan agraria di nasional adalah



membenarkan apa-apa yang tengah dilakukan dan terjadi di tingkat lokal (reklaiming, okupasi, pendidikan dan pengorganisasian) dengan cara melakukan advokasi ke dalam tubuh-tubuh kekuasaan negara (Pemerintah, DPR, Komnas HAM). Upaya ini bertujuan agar serikat-serikat di tingkat lokal itu bisa tetap eksis, membesar atau bermertamorfosa.

Sementara itu, proses di tingkat lokal juga mengalami perkembangan penting. Sebab, banyak wilayah-wilayah gerakan yang telah melakukan okupasi tanah berhasil melakukan transformasi sosial di dalamnya dengan cara mengubah cara-cara berproduksi mereka. Semisal sekelompok buruh kebun di sekitar perkebunan telah berubah menjadi menjadi petani skala rumah tangga.

Pada wilayah-wilayah hutan produksi, banyak kelompok tani telah berhasil mengubah corak bertanam monokultur milik perusahaan kehutanan menjadi sistem wanatani yang mandiri. Melalui cara pandang ini, sebenarnya telah terjadi kantung-kantung revolusi agraria di lokal-lokal Indonesia. Meski skalanya masih pada level kampung.

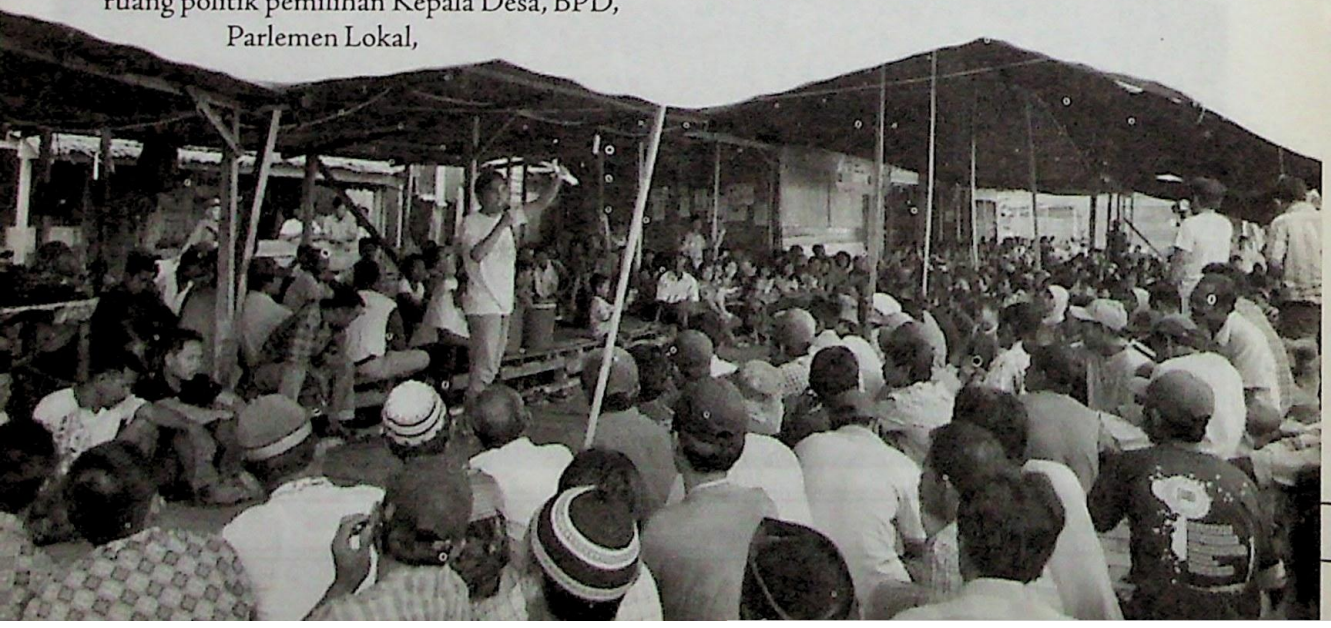
Untuk menjaga eksistensi dari kantung lokal pembaruan agraria, mereka juga sering memanfaatkan ruang-ruang politik yang telah dibuka oleh negara. Seperti, memanfaatkan ruang politik pemilihan Kepala Desa, BPD, Parlemen Lokal, dan bahkan memainkan peran penting dalam pemilihan kepala daerah serta pemilihan DPD.

Menuju Konfederasi

Beragamnya perkembangan organisasi perjuangan pembaruan agraria di Indonesia ini, menuntut para pelaku gerakan untuk terus membuka ruang politik pembaruan agraria agar menjadi lebih luas. Memainkan ruang dialog yang lebih luas antar gerakan pembaruan agraria di wilayah dan nasional. Tujuannya, agar dapat saling bagi pengalaman yang ada.

Hal terpenting lainnya adalah, melakukan transformasi agraria secara sistematis pada wilayah-wilayah pendudukan gerakan pembaruan agraria untuk dijadikan basis ikatan solidaritas yang baru dalam gerakan pembaruan agraria.

Ingat, reforma agraria yang *genuine*, hanya dapat dilakukan oleh serikat/organisasi tani yang kuat dan masif. Reforma agraria tidak bisa hanya dilakukan oleh organisasi tani lokal. Karena, persoalan agraria bersifat nasional, maka organisasi tani lokal pun harus mengkonsolidasikan diri menjadi satu wadah organisai yang bersifat nasional dan memiliki jaringan yang kuat di dunia internasional. Disinilah, mengapa membangun konfederasi serikat tani nasional menjadi penting dilakukan oleh organisasi tani lokal ▪



Bangun Kekuatan:

Reforma Agraria Mengudara di RRI

Jakarta: Gembar-gembor pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, sudah diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak tahun 2007. Namun, pelaksanaanya, belum pernah terjadi hingga sekarang. Karena itu, KPA bersama radio RRI merasa terpanggil untuk terus mengkampanyekan betapa pentingnya raforma agraria segera dilaksanakan di negara ini.

Diyakini, tanpa pelaksanaan reforma agraria, rasanya sulit bangsa Indonesia membebaskan diri dari kemiskinan rakyat. Membangun sistem ekonomi rakyat yang mandiri untuk memperkokoh sistem ekonomi di negara agraris ini.

"Indonesia harus dapat membebaskan diri dari keterpurukan ekonomi. Membebaskan diri dari ketergantungan sistem ekonomi-politik negara-negara asing. Caranya, reforma agraria harus segera dijalankan sebagaimana amanat para pendiri negara republik ini," kata Sekjen KPA, Idham Arsyad.

Namun, imbuhnya, reforma agraria yang selama ini digembar-gemborkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya sebuah wacana yang tidak pernah diwujudkan. Untuk mendorong dukungan publik yang luas terhadap Reforma Agraria, KPA bersama radio RRI membuat acara *talkshow* dialog interaktif suara pembaruan agraria.

Acara ini disiarkan secara langsung pada hari minggu pukul 10:00 – 11:00 di Studio Pro3 RRI Pusat Lt 7, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Selatan, mulai tanggal 18 April-24 Oktober 2010. Siaran ini akan diudarakan melalui frekwensi FM 88,8 MHz dan di-*relay* oleh lebih dari 50 radio RRI daerah di seluruh Indonesia.

Selain untuk memenuhi hak publik atas informasi, tujuan pokok dari program ini adalah untuk mensosialisasikan gagasan dan agenda pembaruan agraria ke masyarakat luas. Membuka ruang dialog publik mengenai pentingnya pelaksanaan pembaruan agraria dalam kerangka untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, laju pertumbuhan urbanisasi, dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Menyatukan pandangan dan dukungan publik, agar reforma agraria dapat menjadi sebuah agenda bangsa yang harus segera dilaksanakan.

Selain menghadirkan beberapa tokok masyarakat, kalangan akademisi, dan para penggiat reforma agraria lainnya, dialog interaktif ini juga akan menampung berbagai macam keluhan dan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Terutama yang terkait dengan masalah pelaksanaan reforma agraria.

Adapun tema-tema dalam *talkshow* adalah: *Pertama*, dilakukan tanggal 18 April 2010 dengan tema,"Pembaruan Agraria

sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia". Pembicaranya, Sekjen KPA, Idham Arsyad dan Koordinator Program Strategic Aliance for Poverty Alleviation (SAPA) Program Strategis Ilmiah PKPK Menko Kesra RI, Fakhrulsyah Mega.

Kedua, tanggal 16 Mei 2010 dengan tema, "Kebijakan dan Langkah Operasional Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia." Sebagai pembicara Ketua Dewan Nasional KPA, Usep Setiawan dipanel dengan Deputi Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan BPN RI, Yuswanda Temenggung.

Ketiga, tanggal 20 Juni 2010 dengan tema "Bercermin dari Kasus Agraria (Bagaimana Konflik Agraria Harus Ditangani? Sebagai pembicara yang dihadirkan adalah Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin dan Anggota Komnas HAM,Ridha Saleh.

Keempat, tanggal 18 Juli 2010 dengan tema "Peran Organisasi Rakyat dalam Pelaksanaan Pembaruan Agraria." Sebagai narasumber Deputi Sekjend Penguatan Organisasi Rakyat KPA, Kinan dan Direktur Penataan Gunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional BPN RI, Iwan Taruna Iksa.

Kelima, tanggal 29 Agustus 2010 dengan tema: "Setengah Abad UUPA 1960 versus RUU Pengadaan Tanah". Sebagai pembicara Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin dan Anggota Tim Panja Pertanahan Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko.

Keenam, tanggal 24 Oktober 2010 dengan tema:"Memanggil Kembali Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) pada Pemerintahan SBY-Boediono". Sebagai pembicara dalam program talkshow yang terakir adalah Deputi Reset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin bersama Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB/ Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/ STPN, Prof. Endriatmo Soetarto.

Diharapkan program siaran *talkshow* Suara Pembaruan Agraria KPA bersama RRI ini dapat menjadi sarana, mengembangkan wacana betapa pentingnya reforma agraria harus segera dilaksanakan. Semoga, program dialog interaktif yang akan disiarkan RRI ini dapat menjadi sarana untuk menyatukan gerak seluruh componen kekuatan pokok penggerak reforma agraria, khususnya kaum tani. Karena, reforma agraria tidak akan pernah hadir tanpa kekuatan serikat tani yang terorganisir dan bersifat masif di seluruh penjuru negeri. Semoga*-Sidik Suhada-





"Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Defects in agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in impede economic development,"
(Bung Karno, 17 Agustus 1960 dalam Sidik Suhada, 2009: 125)